

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, tingkat kemiskinan di provinsi ini pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,21 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya, BPS mencatat adanya peningkatan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,05 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,03 poin (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024). Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Sulawesi Barat menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang saling berkaitan, seperti pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan ketimpangan pendapatan memengaruhi upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah global yang mempengaruhi dan mengkhawatirkan semua negara di dunia karena terkait erat dengan berbagai aspek kehidupan. Beberapa negara miskin masih menghadapi masalah distribusi pertumbuhan dan pendapatan yang tidak merata. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang pesat, tetapi juga menghasilkan tingkat kemiskinan yang tinggi. India misalnya, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai hampir 7% pada tahun 2023, masih harus menghadapi kenyataan bahwa lebih dari 10% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang berarti sekitar 135 juta orang belum menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. Hal serupa terjadi di Nigeria, di mana meskipun perekonomian tumbuh lebih dari 3%, sekitar 40% penduduknya masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo bahkan menunjukkan kontradiksi yang lebih tajam: meskipun pertumbuhannya di atas 6%, lebih dari 60% rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit.

Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5% dan berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,36%, namun tantangan tetap ada terutama di wilayah pedesaan yang belum tersentuh pembangunan secara merata. Bangladesh juga mengalami pertumbuhan lebih dari 5%, namun hampir 1 dari 5 penduduknya masih tergolong miskin. Sejak kedatangan penjajah kolonial, bangsa Indonesia selalu berada di bawah bayang-bayang kemiskinan ganda. Rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah (Miftakhuddin, 2019).

Di sebagian besar negara, kemiskinan masih menjadi masalah penting, termasuk di Indonesia. Pemberantasan kemiskinan selalu menjadi topik pembangunan, agenda utama dan keberlanjutan di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dalam dokumen yang dihasilkan *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, pengentasan kemiskinan juga menjadi tujuan yang pertama dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati (SDGs). Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024, strategi penurunan tingkat kemiskinan juga merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2022) didefinisikan sebagai keadaan ekonomi dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dengan garis kemiskinan (makanan dan non makanan). Seseorang dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dianggap sebagai alat yang efektif bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat miskin. Apalagi bagi perekonomian Indonesia yang baru saja mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, tentunya ada dampak langsung dan tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.



Gambar 1. 1. Penduduk Miskin dan Indeks Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan diperlukan garis/ambang kemiskinan. Menurut Masdi (2021) garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah dari pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya perbulan. Kebutuhan pangan dan bukan pangan dari Maret 2021 hingga Maret 2022, garis kemiskinan nasional meningkat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 6,97% dari Rp. 472.525,00/orang/bulan pada Maret 2021 menjadi Rp. 505.469,00/orang/bulan pada Maret 2022.

Pada saat yang sama, garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan sektor pedesaan meningkat sebesar 6,46%. meningkat sebesar 7,56%. Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi Rp. 801.437,00 Rp

per kapita per bulan. Sedangkan Sulawesi Selatan sudah menjadi provinsi dengan garis kemiskinan terendah adalah Rp399.755,00 per kapita per bulan. Jika dirinci berdasarkan wilayah, garis kemiskinan perkotaan tertinggi tercatat di Provinsi Kalimantan Utara dengan Rp 804.517,00 per kapita per bulan dan garis kemiskinan pedesaan tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rp 820.543,00 per kapita per bulan. Lalu garis tingkat kemiskinan perkotaan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Rp. 404.705,00 perkapita perbulan dan garis kemiskinan pedesaan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 383.414,00 per penduduk per bulan. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023), jumlah penduduk miskin per Maret 2023 sebanyak 26.161 juta jiwa atau sebesar 9,54% dari total penduduk di Indonesia. Untuk Sulawesi Barat Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebanyak 164.140 jiwa, atau sekitar 11,49% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5.120 jiwa dibandingkan dengan September 2022, dan penurunan sebesar 1.580 jiwa dibandingkan dengan Maret 2022 (BPS Sulawesi Barat, 2023). Ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

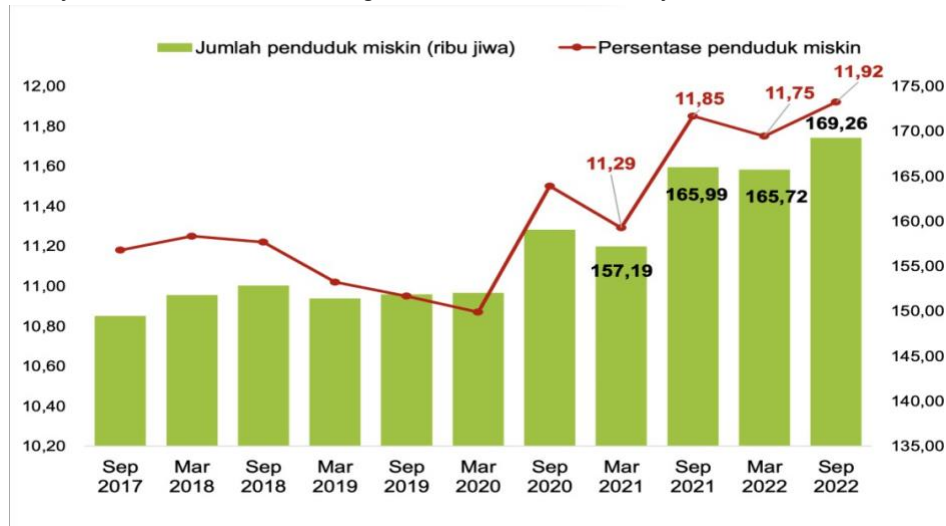
Diantara persoalan mendesak dan sangat kompleks yang perlu diselesaikan selama ini di tanah air, khususnya di provinsi dan kabupaten/kota, adalah masalah kemiskinan yang semakin merambah ekonomi penduduk pedesaan di daerah (Balqis & Suriani, 2020). Kemiskinan merupakan masalah umum di Indonesia dan menarik untuk dibahas secara mendalam sebagai forum debat dalam berbagai kegiatan workshop dan sebagai dasar forum diskusi. Penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan dengan mengintegrasikan banyak aspek untuk memudahkan mengatasi masalah (Gumelar, 2021).

Dari perspektif dasar, kemiskinan meliputi sedikit modal, kurang partisipasi dalam organisasi sosial politik, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder meliputi jejaring sosial yang buruk, sumber daya keuangan yang rendah dan informasi yang terbatas (Anisa Sopiah, 2023). Selanjutnya aspek-aspek kemiskinan tersebut termanifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, rendahnya persediaan air minum yang aman, terbatasnya ketersediaan perumahan yang layak, pelayanan kesehatan yang tidak merata, tingkat pendidikan yang rendah, dan semua aspek tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkaitan satu sama lain.

Kemiskinan di Indonesia terjadi karena kapasitas masyarakat pelaku ekonomi tidak seimbang, sehingga ada masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan tidak dapat menikmati hasil dari proses pembangunan tersebut (Soegijoko, 1997 dalam Trimo, 2022). Kemiskinan menimbulkan banyak dampak negatif, selain menimbulkan banyak masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi. Unsur kemiskinan lain yang sangat nyata, terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat pada banyakarganya yang kekurangan pangan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan pengusiran dari pemukiman. Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, namun masih jauh dari pokok permasalahan. Implementasi kebijakan dan program belum memberikan hasil yang optimal. Masih terdapat kesenjangan antara rencana dan pencapaian target karena

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada program sektoral (Trimo, 2022).

Kemiskinan juga merupakan faktor penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Berkurangnya angka kemiskinan di suatu wilayah dapat menandakan bahwa penduduk suatu wilayah semakin sejahtera. Namun, ditingkat nasional dan daerah, kemiskinan tetap menjadi “kewajiban” di masing-masing daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena mencakup banyak aspek dampak yang berbeda, tidak hanya terkait dengan kecacatan fisik tetapi juga banyak faktor sosial lain yang juga menjadi ukuran kemiskinan. Beberapa penulis berpendapat bahwa kemiskinan merupakan akumulasi dari masalah multidimensi. Bank Dunia (2002) membagi dimensi kemiskinan menjadi empat poin utama, yaitu minimnya peluang, rendahnya kompetensi, rendahnya tingkat keamanan, dan rendahnya kapasitas. Kemiskinan juga terkait dengan hak-hak sosial, ekonomi dan politik yang terbatas, yang menyebabkan kerentanan, degradasi dan ketidakberdayaan.



Gambar 1. 2. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Barat

Sumber: Berita Resmi Statistik Sulawesi Barat, 16 Januari 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat (2022) gambar 1.2 dapat dilihat bahwa data penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada September 2022 mencapai 11,92% atau sebanyak 169,26 ribu jiwa, naik 7% dibandingkan September 2021 yaitu 11,85% atau sebanyak 165,99 ribu jiwa. Menurut (Trimo, 2022) penyebab kemiskinan dapat dikaitkan dengan kondisi alam dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya (VH). Kemiskinan alam dan ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia dan lainnya, sehingga peluang produksi relatif rendah dan tidak berperan dalam pembangunan.

Kemiskinan struktural dan sosial adalah hasil dari pembangunan, kelembagaan dan kebijakan yang tidak merata. Kemiskinan budaya (*cultural*) disebabkan oleh sikap atau kebiasaan gaya hidup yang dirasa cukup untuk mengunci seseorang dalam kemiskinan.

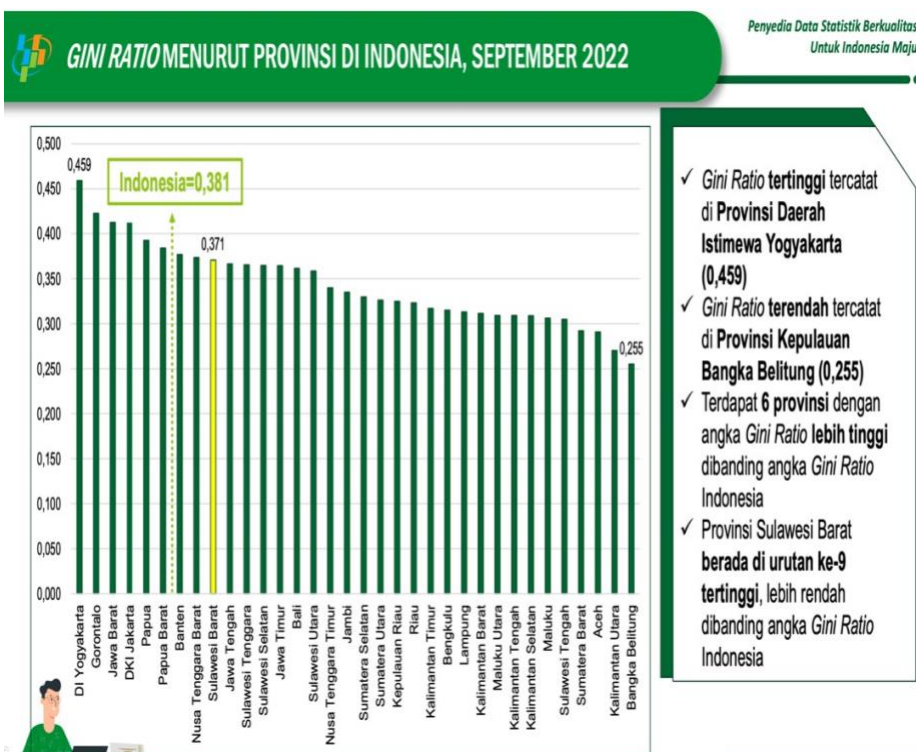
Penyebab kemiskinan berasal dari dalam dan luar penduduk miskin. Penyebab internal antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu. Penyebab eksternal adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja dan persaingan yang membuat masyarakat miskin terpinggirkan.

Lebih lanjut kategori kemiskinan dapat dibedakan menurut pola waktunya, yaitu: (1) kemiskinan persisten, yaitu kemiskinan kronis atau turunan, termasuk wilayah dengan sumber daya alam yang sangat terbatas atau terisolasi; (2) kemiskinan siklis, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) kemiskinan musiman, yaitu kemiskinan musiman yang umum terjadi di kalangan nelayan dan petani tanaman pangan; (4) kemiskinan insidental, yaitu kemiskinan akibat suatu bencana alam atau dampak kebijakan. (Trimo, 2022)

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi menurut (Kuncoro, 2006): 1) pada tingkat mikro, kemiskinan disebabkan oleh struktur kepemilikan sumber daya yang timpang sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Orang miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah; 2) Kemiskinan bersumber dari perbedaan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada rendahnya produktivitas yang kemudian berujung pada rendahnya upah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya tidak beruntung, perbedaan perlakuan atau faktor keturunan; 3) Kemiskinan berasal dari perbedaan akses terhadap modal. Modal yang rendah menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan keterbelakangan, dimana ini terus bergerak dalam lingkaran sehingga tidak dapat ditentukan mana yang menjadi akhir dan mana yang menjadi awal. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan tidak merata menyebabkan kesenjangan pendapatan, di mana ada yang berpenghasilan tinggi bahkan sangat tinggi, tetapi tidak sedikit yang berpenghasilan rendah.

Keterkaitan antara ketimpangan dan kemiskinan bersifat pragmatis, yaitu ketimpangan memperparah kemiskinan atau ketimpangan merupakan salah satu bentuk kemiskinan (Sugiyarto et al., 2015). Gini Ratio dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Nilai pertidaksamaan berkisar dari 0 (persamaan sempurna) hingga 1 (pertidaksamaan sempurna). Koefisien gini untuk ketimpangan sedang antara 0,36 dan 0,49, untuk ketimpangan tinggi antara 0,50 dan 0,70 dan untuk ketimpangan rendah antara 0,20 dan 0,35 (Arsyad, 2016).

Ketimpangan adalah masalah lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Sen (1976) dan Forster et al. (1984) dalam Annim, et al. (2012). Antara ketimpangan dan kemiskinan adalah bahwa ketimpangan merupakan salah satu komponen kemiskinan. Barber (2008) dalam Annim, et al. (2012) melihat keterkaitan antara ketimpangan dan kemiskinan sebagai mata rantai pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan memperburuk kemiskinan atau bahwa ketimpangan adalah salah satu bentuk kemiskinan. Rodríguez-Pose & Hardy, (2015), berpendapat bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan, baik secara spasial maupun interpersonal. Selain itu, hubungan antara perbedaan antarpribadi dan kemiskinan dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan ketimpangan wilayah.



Gambar 1. 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, (2022). Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan ke-9 tertinggi dan masuk dalam kategori sedang karena berada di angka 0,371, namun lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Indonesia. Profesor Simon Kuznet menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan jangka panjang untuk memberi orang pasokan barang ekonomi yang terus meningkat. Kapasitas ini akan tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, ideologi dan kelembagaan yang diperlukan (NurAzizah, n.d, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi kemiskinan. Di banyak negara di seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat yang paling penting untuk pengentasan kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara-negara berkembang, termasuk Indonesia juga dibarengi dengan masalah meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhannya, maka dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mampu melaksanakan pembangunan daerahnya dengan baik. Namun, permasalahan pembangunan daerah yang masih terus berlanjut adalah pertumbuhan ekonomi tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat. Secara teori, langkah-langkah untuk memerangi kemiskinan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dicapai dengan memperluas kesempatan kerja (mengurangi tingkat pengangguran) dan memaksimalkan investasi

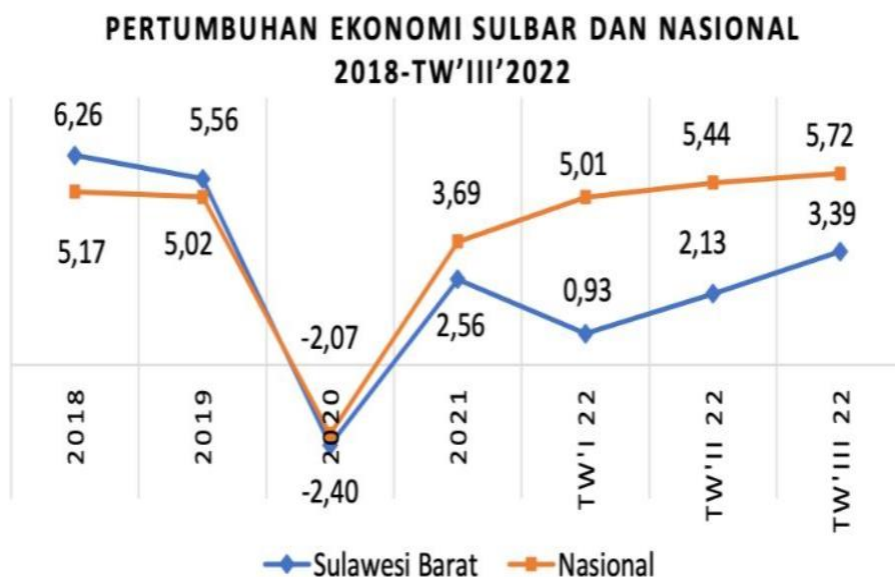
produktif di berbagai sektor ekonomi. (Jonaidi, 2012b). Menurut (Sukirno, 2016) teori pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa, yaitu:

1. Teori pertumbuhan klasik yang menekankan pentingnya faktor produksi untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Namun, ekonom klasik fokus kepana tenaga kerja.
2. Teori Schumpeter menekankan peran pengusaha yang berinovasi dan berinvestasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
3. Teori Harrod-Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor penyebab pertumbuhan total pengeluaran. Pada dasarnya teori ini menekankan peran sisi permintaan dalam mencapai pertumbuhan.
4. Teori Neo klasik: Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan keterampilan masyarakat merupakan faktor terpenting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam kabupaten yang memiliki keunikan wilayah masing-masing. Sulawesi Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu menurun sejak Tahun 2017, terutama pada tahun 2020 pada saat masa pandemic covid 19, berada pada angka -2,40. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu pada angka 2,56 walaupun pada tahun tersebut di Sulawesi Barat terjadi bencana gempa dengan kekuatan 6,2 M yang menghancurkan beberapa pusat perekonomian bahkan menghancurkan Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun masih berjalan secara perlahan. Pada Triwulan I, ekonomi provinsi ini tumbuh sebesar 0,93% secara tahunan (*year-on-year*). Namun, secara kuartalan (*quarter-to-quarter*), terjadi kontraksi sebesar -4,84%, yang mencerminkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi setelah periode akhir tahun sebelumnya.

Memasuki Triwulan II, kondisi mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,13% secara tahunan, dan mengalami kenaikan sebesar 6,44% dibandingkan Triwulan I. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang utama pertumbuhan pada periode ini, disertai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Secara keseluruhan, selama semester pertama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat sebesar 1,55%. Meski menunjukkan arah pemulihan, angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Sulawesi, menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi masih menghadapi tantangan besar di wilayah ini

Tahun 2022 Triwulan III Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat berada pada angka 3,39 naik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2021. Peningkatan nilai tambah terjadi di sebagian besar sektor. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar adalah di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari posisi belanja konsumsi masyarakat. Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 1,26 persen pada triwulan III dibandingkan triwulan II tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat pada gambar dibawah:



Y on Y : 3,39%, Q to Q : 0,10%, C to C : 2,11%

Gambar 1. 4. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat dan Nasional

Sumber: BPS

Di dunia ketiga, desentralisasi telah lama dianggap sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan politik, sosial dan ekonomi. Konsep ini telah digunakan dengan cara yang berbeda di berbagai negara dengan fokus yang berbeda (Smith, 1985). Bird & Vaillancourt (1998) mendefinisikan desentralisasi menjadi tiga istilah berbeda, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit administratif lokal. Delegasi adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah bertindak sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebaliknya, devolusi adalah situasi di mana pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk memutuskan kebijakan. Di negara berkembang, ada beberapa alasan diberlakukannya desentralisasi fiskal antara lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mencapai efisiensi pengeluaran, meningkatkan akuntabilitas atau meningkatkan mobilisasi sumber daya.

Di Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Negara dan Daerah, menyebabkan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat membuat pemerintah lebih dekat kepada masyarakat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan daerah masing-masing serta lebih mampu mengatur strategi yang optimal untuk pembangunan daerahnya. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan bagian dari reformasi untuk meningkatkan administrasi Pemerintah (Oates, 1993). Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan

kekuasaan atau wewenang dalam perencanaan publik, administrasi, dan pemusatan keputusan atau perintah kepada pemerintah. Perwujudan otonomi daerah didasarkan pada dua dimensi, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi keuangan. Kedua dimensi ini menunjukkan konsep dan arah kebijakan desentralisasi fiskal (Sukirno, 2016).

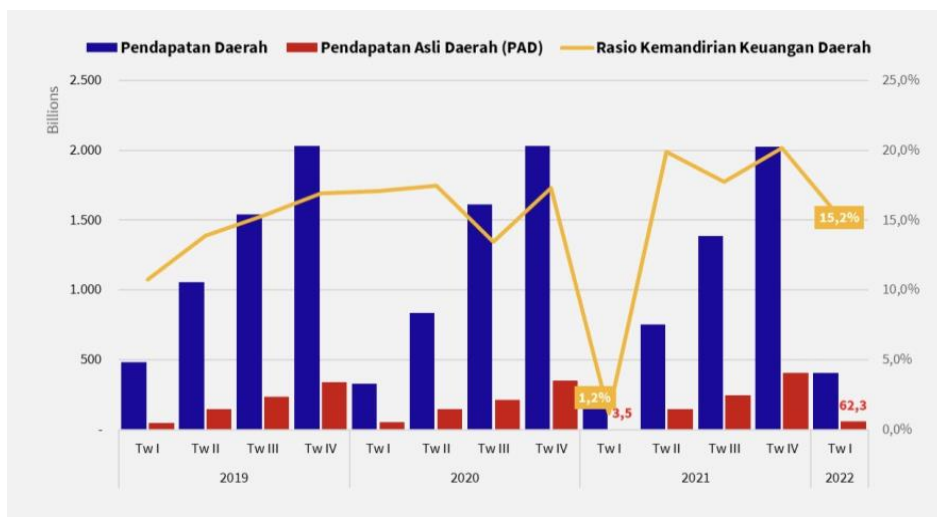
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat bereksproresi dan berkreasi dalam kerangka pembangunan daerahnya, dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Utomo, 2021). Fokus utama pemerintah daerah adalah pendapatan dan belanja daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada dua aspek yang sangat krusial, yakni pendapatan dan belanja daerah. Keduanya merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan daerah menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang dan membiayai berbagai program pembangunan. Di sinilah terlihat sejauh mana sebuah daerah mampu berdiri di atas kekuatan fiskalnya sendiri. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset yang dimiliki. Kemandirian fiskal menjadi tujuan penting, agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa dikurangi dan pengambilan kebijakan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Hamidietal, 2022).

Sementara itu, belanja daerah adalah alat untuk mewujudkan berbagai rencana pembangunan yang telah disusun. Melalui belanja inilah pemerintah membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola belanja dengan efektif dan efisien, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Inilah yang menjadi dasar kuat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah (Hamidietal, 2022). Cita-cita kemandirian fiskal dari kepentingan publik terguncang karena banyak daerah yang masih mengandalkan dana transfer.

Menurut Utomo (2023) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menambahkan sentuhan inovatif pada praktik pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sentuhan perubahan dihadirkan atas dasar bahwa sejumlah artikel yang dianggap tidak relevan perlu dievaluasi kembali. PAD dan kemampuan untuk membantu meningkatkan investasi lokal menjadi tantangan terbesar dengan adanya Undang-undang ini. Secara umum, keberadaan pajak dan retribusi sebagai sumber anggaran dan regulasi berperan penting dalam memperkuat perekonomian daerah, namun masih banyak kendala di tingkat implementasi (Kadir, 2009). Mekanisme pita harga yang disebut-sebut sebagai alat daya saing finansial, ternyata menjadi malapetaka bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD secara optimal dengan menetapkan tarif secara maksimal. Di sisi lain, tarif pajak bertentangan dengan semangat sistem perpajakan, sehingga menciptakan iklim investasi yang menguntungkan. Dengan latar belakang ini, reformasi (restrukturisasi) kebijakan pajak

daerah sangat penting pada saat ini untuk menyeimbangkan fungsi reguler PDRD dengan fungsi anggaran. Peraturan PDRD yang tidak memadai dapat mendistorsi ekonomi lokal dan menghambat perkembangan usaha. Idealnya, reformasi aturan PDRD harus dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan wajib pajak agar tetap kompetitif sehingga tujuan UU dapat terpenuhi (KPPOD, 2021).

Desentralisasi fiskal merupakan aspek otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk membangun kemandirian. Menurut (Pasaribu, 2022) desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk mengelola Pajak dan Bea Masuk Daerah (PDRD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Belanja Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Merancang kebijakan desentralisasi pajak yang baik adalah kunci bagi Indonesia di jalan menuju kemakmuran yang inklusif, berkelanjutan, dan mandiri. Kondisi Derajat desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat pada lampiran 2.



Gambar 1. 5. Rasio Kemandirian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dimana nilai derajat desentralisasi fiskalnya pada tahun 2021 adalah 20,15%. Dari data ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan pertumbuhannya masih sangat mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan melaksanakan program pembangunannya.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah aliran transfer antar pemerintah. Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di banyak negara di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi. (Kuncoro, 2006). Memang, transfer antar pemerintah ini telah menjadi ciri desentralisasi yang paling terlihat, sebagaimana tercermin dalam hubungan ekonomi antara

pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya Oates, (1993), menjelaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasi pengaruh eksternal perpajakan antar daerah, memperbaiki sistem perpajakan, memperbaiki inefisiensi perpajakan dan pemerataan pajak antar daerah. Di era desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dana transfer pusat berfungsi sebagai perimbangan ekonomi antar daerah dan sebagai insentif pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mendefinisikan dana perimbangan menjadi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berupa bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana untuk mengurangi kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antar daerah dimana sumbernya dari alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ini berfungsi menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat membuat pemerintah daerah lebih berperan dalam memandirikan daerahnya, dana transfer diberikan untuk menjalankan peran desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bertujuan membiayai kegiatan khusus yang termasuk urusan daerah dimana sesuai dengan tujuan nasional (*Specific Grants*), berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan peran desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana berdasarkan angka persentase yang diperoleh daerah penghasil dimana bersumber dari alokasi dana APBN dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dan menjalankan fungsi desentralisasinya.

Transfer dari Pemerintah pusat biasanya diperuntukkan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah yang termuat dalam APBD, untuk membiayai program utamanya, sebagaimana tujuan dana transfer untuk mengurangi kesenjangan fiskal maka pemerintah daerah dapat memperbaiki taraf kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang berpihak kepada kepentingan rakyat serta memenuhi standar pelayanan minimal. Ini berarti pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mengurangi masalah kemiskinan di daerahnya.

Untuk Provinsi Sulawesi Barat, kondisi perkembangan dana transfer dan kemiskinan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1. Perkembangan transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah dana hibah dan penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 - 2022

Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Pendapatan Transfer	Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten	Transfer Bantuan Keuangan
2017	149,76	445.228.018.490	364.249.411.339	347.276.409.260
2018	151,78	0	42.212.100	80.558.069.472
2019	151,40	119.526.420.702	148.809.394.814	153.819.477.529

2020	152,20	64.819.787.000	72.783.325.397	57.069.012.800
2021	157,19	140.074.163.061	129.324.330.603	134.952.170.980
2022	157,19	140.074.163.061	129.324.330.603	134.952.170.980

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Sulbar

Dari tabel di atas angka kemiskinan, pendapatan transfer, transfer antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat, perkembangannya dalam kurun waktu 2017 sampai 2021 memiliki *trend* fluktuatif. Untuk dana perimbangan mempunyai kontribusi yang tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat ketergantungan terhadap alokasi dana Pusat ke daerah untuk Provinsi Sulawesi Barat masih Tinggi. Sehingga jika terjadi pengurangan yang signifikan atas dana perimbangan kedepannya maka Provinsi Sulawesi Barat akan mengalami berbagai kendala dalam proses pembangunannya. Untuk itu sangat diharapkan agar Provinsi Sulawesi Barat segera merencanakan kebijakan dalam mendorong peningkatan kemandirian keuangannya. Dari paparan tabel di atas maka sangat diperlukan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dengan tidak berharap banyak pada pengalokasian dana pusat, tetapi melalui kemandirian daerah. Selain itu, daerah harus didorong untuk bertindak lebih aktif, agar proses pembangunan tidak tertinggal dari dinamika perekonomian negara. Akan lebih baik jika pemerintahan daerah dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah agar dapat mengoptimalkan Pendapat Asli Daerahnya (PAD) (Utomo, 2021).

Teori neoklasik menyatakan bahwa investasi dipandang sebagai salah satu pendorong terpenting pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Nanga, 2005). Pada umumnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan, tetapi digunakan untuk melakukan belanja modal dalam menunjang kehidupan masyarakat. Dengan infrastruktur yang baik dapat menarik investor lokal maupun asing untuk berinvestasi. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian bahkan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala jenis kegiatan penanaman modal, baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia (Pangiuik, 2017).

Menurut Pateda et al., (2019) investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berinvestasi adalah pembelanjaan dengan tujuan meningkatkan modal dan utilitas di masa depan dan mengorbankan peluang konsumsi yang ada. (Shavira Octavia, 2021). Lebih lanjut (Shavira Octavia, 2021) berpendapat bahwa Investasi memiliki dua aspek, yaitu konsumsi saat ini dan harapan akan keuntungan di masa depan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Salah satu penyebab percepatan pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya modal, yang dimiliki atau disediakan oleh penduduk berpenghasilan tinggi (kapitalis). Rata-rata, mereka berinvestasi pada industri dengan produktivitas tinggi dan keuntungan tinggi. Jadi kita bisa menyimpulkan dari itu untuk mengurangi kemiskinan

dan ketimpangan di suatu wilayah, pertumbuhan harus memiliki produktivitas yang tinggi, dibantu oleh besarnya akumulasi modal melalui investasi. Sebagian besar investasi berasal dari penduduk berpenghasilan tinggi yang merupakan bagian dari distribusi pendapatan. Dengan demikian, distribusi pendapatan dapat dipandang sebagai sumber kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (daerah) sebagai produk atau hasil.

Tabel 1. 2. Data Investasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022

Tahun	Target Nilai Penanaman Modal (PMDN & PMA)	Realisasi Nilai Penanaman Modal (PMDN & PMA)	Dalam % (Persen)
2017	1.800.000.000.000	812.285.595.900	45.13
2018	2.110.000.000.000	3.475.190.693.000	164.70
2019	8.015.000.000.000	1.339.254.390.000	16.71
2021	220.000.000.000	346.925.282.500	157.69
2020	350.000.000.000	481.724.905.850	137.64
2022	600.000.000.000	1.719.244.147.660	286.56

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Sulbar

Untuk perkembangan investasi berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perolehan realisasi investasi tertinggi berdasarkan nilai di tahun 2018 sebesar 3.475.190.693.000 dari target 2.110.000.000 dan terendah di tahun 2020 sebesar 346.952.282.500 dari target 220.000.000.000. Terdapat beberapa masalah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Barat yaitu banyak peluang investasi yang belum memiliki kajian, Infrastruktur pendukung investasi belum memadai, regulasi yang menjamin investasi sangat kurang serta daya saing daerah masih rendah, sehingga sulit untuk meningkatkan jumlah investasi. Berdasarkan penjelasan di atas maka Provinsi Sulawesi Barat harus mendorong agar masalah tersebut di atas dapat segera terselesaikan dengan baik.

Belanja daerah juga merupakan bagian dari kebijakan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat investasi dan kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pemerataan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dipisahkan dari tingkat belanja sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemiskinan.

Adolf Wagner dalam Azwar (2016) menjelaskan bahwa pengeluaran dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Hal ini oleh Wagner disebut dengan *secto* selalu meningkatnya peranan pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa peran pemerintah semakin meningkat dalam keseluruhan kegiatan dan kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam konteks *sector* Wagner dapat dilihat bahwa ada beberapa *sector* peningkatan pengeluaran pemerintah, yaitu peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan, peningkatan kegiatan kesejahteraan, pertumbuhan sektor perbankan seiring dengan percepatan pembangunan, perbaikan dalam operasional perbankan dan intensifikasi kegiatan pembangunan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dipisahkan dari tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketahanan daerah terus berkembang dari tahun ke tahun dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan dengan berbagai kebijakan baik dalam bentuk program maupun kegiatan dari tahun 2017 – 2022 di berbagai sector dan dengan kriteria sasaran yang berbeda-beda. Tabel dibawah ini menyajikan jenis-jenis belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tercatat sejak tahun 2017 – 2022.

Tabel 1. 3. Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022

Tahun	Pendapatan Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Total Belanja
1	2	3	4	5	6 = 2+3+4+5
2017	181.349.012.800	1.286.180.355.500	459.836.460.501	11.510.970	1.746.028.307.021
2018	172.749.284.524	1.251.360.756.233	321.974.753.003	537.273.535	1.573.872.782.772
2019	221.592.720.211	1.420.141.672.132	364.249.411.339	42.212.100	1.784.433.295.571
2021	210.888.490.329	1.350.841.815.500	347.276.409.260	80.558.069.472	1.778.676.294.231
2020	170.432.402.304	1.410.391.991.233	402.867.597.767	2.647.108.868	1.815.906.697.868
2022	224.904.468.328	1.315.943.743.498	547.546.846.841	1.323.1587.559	1.864.813.748.898

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Sulbar

Dari tabel di atas terlihat bahwa belanja daerah selalu meningkat, ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan literatur mutakhir, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak lagi cukup dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi semata. Studi-studi terbaru menegaskan bahwa efektivitas pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, kualitas belanja publik, kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan kemampuan daerah menarik investasi yang inklusif. Dalam konteks ini, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, ketergantungan transfer yang tinggi, dan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi menghadapi tantangan ganda, yaitu mendorong pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi secara lebih merata. Oleh sebab itu, penelitian yang menguji hubungan PAD, belanja daerah, dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menjadi penting, karena dapat menjelaskan bukan hanya apakah kebijakan dan aktivitas ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi juga melalui mekanisme apa pengaruh tersebut bekerja

Oleh karena itu, penulis mengusulkan judul penelitian Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi Barat: Studi Empiris Terhadap Pengaruh Faktor Ekonomi Regional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat baik secara parsial maupun secara simultan ?
2. Bagaimana pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat baik secara parsial maupun secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat baik secara parsial maupun secara simultan?
4. Bagaimana model yang tepat untuk pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat baik secara parsial maupun secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat secara parsial maupun secara simultan.
2. Menganalisis pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat secara parsial maupun secara simultan.
3. Menganalisis pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat secara parsial maupun secara simultan.
4. Menganalisis dan membuat model yang tepat untuk pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat secara parsial maupun secara simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan data serta rekomendasi kepada pemerintah di dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan teori berdasarkan premis dan sintesa serta membuat model yang tepat untuk PAD, belanja daerah, penanaman modal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam melihat pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat untuk direkomendasikan kepada:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meminimalisir kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dengan mengoptimalkan PAD, belanja daerah dan penanaman modal.
2. Menjadi informasi dan data yang *up to date* bagi instansi atau pengambil kebijakan yang terkait dalam mengatasi kemiskinan.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
4. Menjadi referensi bagi peneliti lanjutan dalam menindaklanjuti kajian dalam prospektif yang lain selain PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi metode untuk membatasi permasalahan dalam kajian ilmiah. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan batasan tentang subjek penelitian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meminimalisir kemiskinan.

Penelitian berfokus pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat, mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada dengan data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga terkait. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen, dependen dan intervening. Variabel dependen atau variabel bebas yang diamati yaitu PAD, belanja daerah dan penanaman modal. Selanjutnya variabel dependen adalah kemiskinan, serta variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

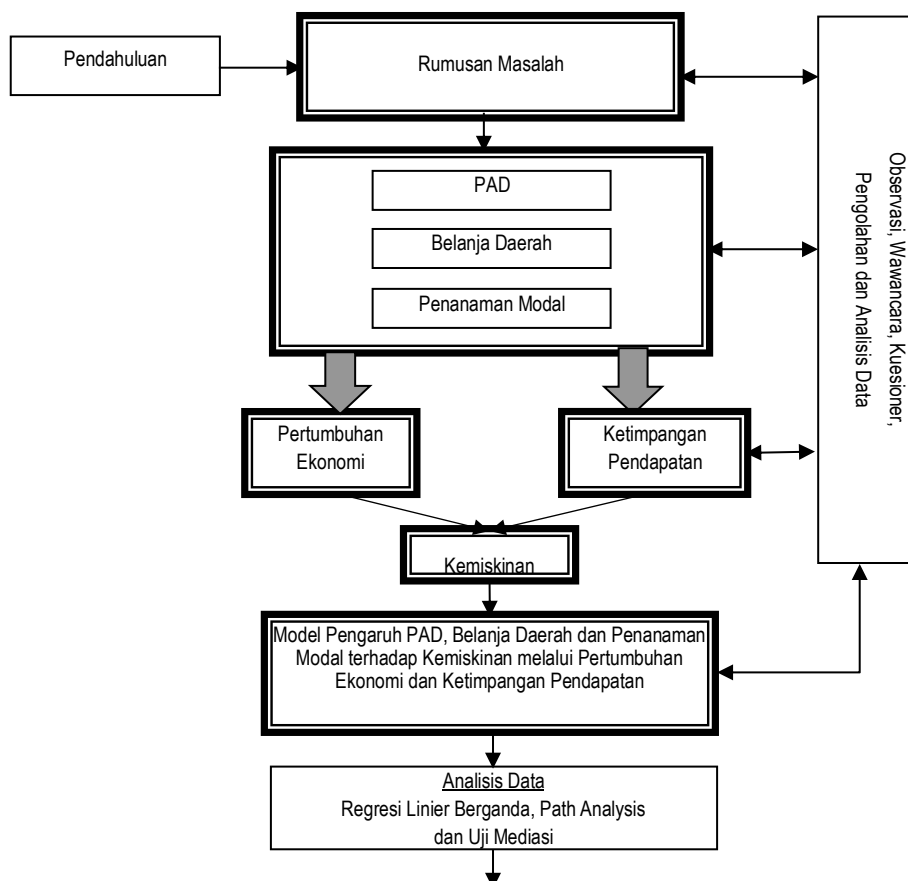
Untuk menjaga konsistensi konseptual, istilah pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini merujuk pada perubahan kinerja ekonomi daerah dari waktu ke waktu. Apabila indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, maka variabel tersebut dipahami sebagai proksi kapasitas ekonomi rata-rata penduduk daerah, bukan semata-mata laju pertumbuhan output. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian dilakukan secara hati-hati: peningkatan indikator ini menunjukkan perbaikan kapasitas ekonomi per kapita, tetapi belum otomatis mencerminkan pertumbuhan yang inklusif atau merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

PAD ditentukan berdasarkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pemerintah daerah. Belanja daerah mengacu pada alokasi belanja

modal, belanja sosial, dan belanja lainnya. Penanaman modal meliputi investasi domestik maupun asing yang direalisasikan di Provinsi Sulawesi Barat.

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan ketimpangan pendapatan menggunakan koefisien gini untuk melihat distribusi pendapatan. Dan untuk kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan menggunakan data trend dinamis tahun 2017 – 2022).

Penelitian mengacu pada konteks sosial-ekonomi yang melihat karakteristik masyarakat Sulawesi Barat, mulai pola mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur, menjadi bagian dari analisis, juga dari aspek eksternal seperti kebijakan fiskal dan investasi daerah. Ruang lingkup penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan pengaruh antar variabel dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Secara garis besar, terkait pengaruh PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kerangka seperti ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. 6. Alur Penelitian Pengaruh PAD, Belanja Daerah dan Penanaman Modal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Barat

1.6. Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) adalah perihal baru yang diperoleh dari penelitian. Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan, namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhinya. Ini dapat dilihat dari penelitian (Pateda et al., 2019) yang berjudul Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo, dimana variabel dependen adalah tingkat kemiskinan dan variabel independen adalah investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pendapatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama atau simultan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo.

Penelitian lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh (Walinono, 2022) dengan judul Analisis Desentralisasi Fiskal Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Dimana dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi merupakan variabel independen. Sedangkan, investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan merupakan intervening serta tingkat kemiskinan adalah variabel dependen. Kesimpulan dari penelitian adalah Semua variabel bebas dan intervening berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan lainnya, penelitian yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur oleh (Dinarjito et al., 2020) yang menggunakan variabel independen desentralisasi fiskal, investasi dan indeks pembangunan manusia serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi regional menyimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur.

Selain penelitian di atas, terdapat juga penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh Khamilah Siregaretal (2020) dengan judul Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, dengan variabel dependennya kemiskinan. Dimana kesimpulan yang diperoleh adalah secara parsial (Uji t) dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Secara Uji Simultan (Uji F) dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mencoba menggunakan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel intervening, karena menurut (Arini & Mustika, 2015) kuat dugaan bahwa kedua variabel tersebut mampu meningkatkan pengaruh PAD, Belanja Daerah, Penanaman Modal terhadap kemiskinan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan penanaman modal terhadap tingkat kemiskinan. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, keterkaitan ini menjadi sangat relevan, mengingat daerah ini masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan meskipun terdapat upaya pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori *Fiscal Federalism/Fiscal Decentralization* sebagai *grand theory* yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1989), serta diperkuat oleh Wallace E. Oates melalui *Fiscal Federalism* (1972 & 1999). Dalam perspektif Musgrave dan Musgrave, peran pemerintah dalam kebijakan fiskal mencakup tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan layanan publik, fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi alokasi dan sebagian fungsi distribusi menjadi sangat penting karena pemerintah daerah berada lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam perkembangan literatur global mutakhir, relevansi fiscal federalism tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pendelegasian kewenangan fiskal dari pusat kepada daerah, tetapi sebagai kerangka untuk menjelaskan bagaimana kualitas otonomi fiskal, kapasitas institusional, desain transfer, dan kualitas belanja publik menentukan kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan sumber daya fiskal menjadi kesejahteraan. Dengan demikian, dalam penelitian ini fiscal federalism dipahami bukan hanya sebagai teori pembagian kewenangan, melainkan sebagai teori tentang efektivitas kapasitas fiskal daerah. Artinya, Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah, dan penanaman modal baru dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan apabila diikuti kualitas alokasi anggaran, kualitas tata kelola, dan kemampuan pemerintah daerah mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar bersifat inklusif serta manfaatnya terdistribusi lebih merata.

Sejalan dengan itu, Oates menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik secara lebih responsif sesuai dengan karakteristik dan preferensi masyarakat setempat. Namun, efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan daerah, tetapi juga oleh kapasitas fiskal, kualitas belanja, dan kemampuan pemerintah daerah mengarahkan sumber daya publik untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menurunkan ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian ini, teori *fiscal federalism* digunakan sebagai payung teoritik untuk menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah, dan

penanaman modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. PAD dipahami sebagai cerminan kapasitas fiskal daerah, belanja daerah sebagai instrumen alokasi dan distribusi kebijakan publik, sedangkan penanaman modal sebagai instrumen penggerak aktivitas ekonomi daerah. Namun, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan tidak selalu secara langsung, melainkan sangat bergantung pada kemampuan daerah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, *fiscal federalism* menjadi dasar teoritik yang menjelaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak cukup diukur dari peningkatan pendapatan dan belanja daerah, tetapi dari sejauh mana instrumen fiskal daerah mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.

Kerangka hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan dalam penelitian ini merujuk pada konsep *growth-inequality-poverty nexus* yang dikembangkan oleh Bourguignon (2003). Dalam kerangka ini dijelaskan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tidak bersifat langsung, melainkan dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya akan efektif dalam menurunkan kemiskinan apabila hasil pertumbuhan tersebut terdistribusi secara relatif merata di antara kelompok masyarakat.

Ravallion (2001, 2004) juga menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan sangat bergantung pada kondisi distribusi pendapatan awal. Ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi efektivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, bahkan dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa diikuti oleh perbaikan kesejahteraan kelompok miskin. Oleh karena itu, analisis kemiskinan tidak dapat hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mempertimbangkan dinamika ketimpangan pendapatan sebagai variabel mediasi.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka *growth-inequality-poverty nexus* digunakan untuk menjelaskan bagaimana Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah, dan penanaman modal mempengaruhi kemiskinan melalui dua jalur utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selain melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, efektivitas penanaman modal dalam menurunkan kemiskinan juga sangat bergantung pada kemampuan investasi tersebut menciptakan pekerjaan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal. Dalam konteks daerah berkembang, investasi yang terkonsentrasi pada sektor padat modal dengan keterkaitan lemah terhadap ekonomi lokal cenderung meningkatkan output tanpa menghasilkan penurunan kemiskinan yang berarti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jalur pertumbuhan dipahami bukan sekadar kenaikan output, tetapi sebagai proses yang seharusnya membuka akses pekerjaan, meningkatkan produktivitas lokal, dan memperluas manfaat pembangunan ke kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal daerah tidak hanya diukur dari kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diukur dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mengurangi ketimpangan dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

“Selain menggunakan ukuran kemiskinan berbasis garis kemiskinan, penelitian ini juga memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas riil masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Mengacu pada Capability Approach Sen (1999), peningkatan PAD, belanja daerah, dan penanaman modal tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila tambahan sumber daya tersebut belum diterjemahkan menjadi perluasan kemampuan hidup masyarakat miskin. Dengan demikian, kemiskinan dalam penelitian ini tetap diukur secara empiris melalui persentase penduduk miskin, tetapi interpretasi teoritisnya diperluas untuk menjelaskan mengapa peningkatan fiskal dan investasi dapat gagal menghasilkan penurunan kemiskinan yang kuat.”

Oleh karena itu, perlu penegasan bahwa penelitian ini ditempatkan dalam kerangka hubungan antara kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada dua lapis argumentasi. Lapis pertama merujuk pada teori *desentralisasi fiskal* dan *fiscal federalism* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan lokal, dan lapis kedua adalah kerangka *growth-inequality-poverty nexus* yang menegaskan bahwa pengaruh kebijakan fiskal dan investasi terhadap kemiskinan tidak selalu secara langsung, tetapi bekerja melalui kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dengan demikian, PAD, belanja daerah, dan penanaman modal diposisikan bukan semata-mata sebagai input fiskal-ekonomi, melainkan sebagai instrumen kebijakan daerah yang pengaruh akhirnya terhadap kemiskinan ditentukan oleh seberapa jauh ia menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Dengan kerangka tersebut, hubungan antar bab dalam disertasi ini dapat dijelaskan secara lebih koheren. Bab II menelaah outcome akhir kemiskinan secara langsung. Bab III menjelaskan jalur alokasi, yaitu bagaimana kapasitas fiskal dan penanaman modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bab IV menjelaskan jalur distribusi, yaitu bagaimana kapasitas fiskal, belanja daerah, dan penanaman modal berhubungan dengan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya Bab V mengintegrasikan kedua jalur tersebut ke dalam model mediasi untuk menjelaskan bahwa efektivitas PAD, belanja daerah, dan penanaman modal terhadap pengurangan kemiskinan ditentukan oleh dua mekanisme utama, yaitu kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaat pembangunan. Dengan cara ini, struktur disertasi tidak berdiri sebagai kumpulan topik yang terpisah, tetapi sebagai satu alur konseptual yang bergerak dari instrumen kebijakan daerah menuju kualitas hasil pembangunan dan akhirnya menuju kemiskinan.

State of the art penelitian terkini menunjukkan adanya pergeseran dari analisis pengaruh langsung menuju analisis mekanisme transmisi. Literatur terbaru tidak lagi memandang PAD, belanja daerah, atau penanaman modal sebagai variabel yang secara otomatis menurunkan kemiskinan, melainkan sebagai instrumen yang bekerja melalui kualitas pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kapasitas institusional daerah. Dalam ruang ini, *research gap* penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara simultan mengintegrasikan PAD, belanja daerah, dan penanaman modal ke dalam satu model di pemerintah daerah

yang menguji pengaruh langsung terhadap kemiskinan sekaligus pengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Merujuk pada literatur terkini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal, belanja publik daerah, dan penanaman modal terhadap kemiskinan bersifat heterogen dan sangat bergantung pada mekanisme transmisinya. Pada satu sisi, kapasitas fiskal daerah, kualitas belanja publik, dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pada sisi lain, apabila pertumbuhan tersebut tidak inklusif dan manfaat investasi terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi lemah. Dengan demikian, gap penelitian ini tidak hanya terletak pada inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga pada masih terbatasnya studi yang menguji secara simultan hubungan PAD, belanja daerah, dan penanaman modal terhadap kemiskinan melalui dua jalur mediasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, pada konteks provinsi berkembang dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas seperti Sulawesi Barat.

Berdasarkan itu, novelty penelitian ini terletak pada: (1) pengembangan model integratif yang menghubungkan instrumen fiskal daerah dan penanaman modal dengan kemiskinan melalui dua jalur mediasi; (2) pengujian model tersebut pada konteks daerah dengan ketergantungan transfer yang tinggi dan tantangan pembangunan yang kompleks seperti Sulawesi Barat; serta (3) temuan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan investasi belum cukup menurunkan kemiskinan tanpa kualitas pertumbuhan yang inklusif dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

1.7. Daftar Pustaka

- Abimanyu, A. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2005/07/04/102020-format-anggaran-terpadu-menghilangkan-tumpang-tindih>.
- Abu-Bader, S., & Jones, T.V. (2021). Statistical mediation analysis using the sobel test And hayes spss process macro. In *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods* (Vol. 9, Issue 1).
- Adi, P.H. (n.d.). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah*. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Amagoh, F., & Ajab Amin, A. (2012). An Examination of the Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*, 3(6). <https://doi.org/10.5430/ijba.v3n6p72>.
- Andhiani, K.D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 2303–1255.
- Anisa Sopiah. (2023, January 17). *Garis Kemiskinan 2022 Tertinggi dalam 9 Tahun Terakhir*. CNBC Indonesia. Annim, S.K., S.M. and J. Sebu. (2012). *Spatial Inequality and Household Poverty in Ghana*. *Economic Systems*
- Arini, & Mustika, M. D. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal EPUnd*, 4(3), 1140–1163.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi ke-5). UPP STIMYKPN.
- Aryaputra, A., Pratiwi, F., & Rasyid Aryasatya, I. (2022). Transfer Pemerintah Pusat Sebagai Wujud Desentralisasi Fiskal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Bentuk Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendapatan, Efektif atau Tidak? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 111–118.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat. (2023). *Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat*.
- Balqis, R., & Suriani. (2020). *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh*.
- Bird, R.M. (Richard M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.
- Bourguignon, F. (n.d.). *The Poverty Growth Inequality Triangle*. <https://www.researchgate.net/publication/5127146> BPKAD Kab. Kuningan. (2022, October 21). *Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebih Dekat* (Bagian 1).

- <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah- apbd-lebih-dekat-bagian-1>
- Cerra, V., Lama, R., & Loayza, N. V. (2021). Links Between Growth, Inequality, and Poverty: A Survey. IMF Working Paper 21/68
- DaniarParamita,R.W.,Rizal,N.,&Sulistyan,R.(2021). *Metode penelitian kuantitatif* (R.W.Daniar Paramita, N. Rizal, & R. Sulistyan, Eds.; 3rd ed.). Widyagama Press.
- DarwinDamanik,dan,StudiEkonomiPembangunan,P.,Ekonomi,F.,SimalungunJISisingam angarajaBarat,U., Kapul, B., Sitalasari, S., Pematang Siantar, K., Utara -, S., & Penulis, K. (2021). ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PEMATANG SIANTAR. *JurnalKajianEkonomiDanKebijakanPublik*,7(1).
- Deviani.(2016).AnalisisBelanjaDaerahTerhadapPertumbuhanEkonomidanPendidikan(StudiEmpirisKotadan Kabupaten di Sumatera Barat). *Pekbis Jurnal*, 8(1), 1–13.
- Dinarjito, A., Keuangan, P., Stan, N., Dharmazi, A., Pendidikan, B., & Keuangan, P. (2020). Pengaruh sentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1, 57–72.
- Dulyadl. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS* (J.T.Santoso,Ed.).YayasanPrima Agus TeknikdanUniversitasSTEKOM.
- Gumelar, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Untirta.Ac.Id*, 11.
- Hadi,S.,&Saragih,T.M.(2013).OntologiDesentralisasiFiskalDalamNegaraKesatuan. *Perspektif*,XVIII(3). <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010>,
- Hamidi,U.S.,Puspita,D.,PenulisBadan,T.,Fiskal,K.,Keuangan,K.,Pahlevi,M.,Raharja,M., Hadi,S.,Latief Baroto, A., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2022). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Editor*.
- Ibrahim,A.,HaqAlang,A.,Baharuddin,Ahmad,M.A.,&Darmawati.(2018). *METODOLOGI PENELITIAN* (I. Ismail, Ed.; 1st ed.). Gunadarma Ilmu.
- Jonaidi,A.(2012a).Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *JurnalKajianEkonomi*,1.
- Jonaidi, A. (2012b). Analisis Pertumbuhan Ekonomidan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1. <https://media.neliti.com/media/publications/7098-ID-analisis-pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf>
- Kadir,A.(2009).Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia.<http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/08/Pajak-Daerah-dan-Retribusi-Daerah-dalam-Perspektif-Otonomi-di-Indonesia.pdf>
- KhamilahSiregar,O.,&Ramadhan,P.A.(2020).Pengaruhbelanjadaerah,Pendapatanasli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Disumatera utara. *JurnalAkuntansiDanPublik*,11(2).

- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kharisma, B., & Hanifah, H. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2), 179. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.666>
- KPPOD. (2021). PDRD dalam RUU HKPD_Policy Note-.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan* (Ed. IV). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akutansi Sektor Publik*. Andi.
- Marques, J. (n.d.). Pengaruh Investasi, Jumlah Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Timor Leste Periode 2004-2011. Retrieved April 4, 2023, from <http://repository.upnyk.ac.id/4308/1/INTISARI.pdf>
- Masdi, A. (2021). Melacak Kebijakan Penanganan Fakir Miskin. Kementrian Keuangan.
- Miftakhuddin. (2019). *Kolonialisme Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Muthia, A. (2019). Analisis Pro-poor Growth Melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(2).
- Nadhor, R. A. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah (Studi Kasus Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2017-2018).
- Nanga, M. (2005). *Makro ekonomi: teori masalah & kebijakan* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- NurAzizah, L. (n.d.). Apa Itu Teori Pertumbuhan Ekonomi- Gramedia Literasi. Retrieved January 28, 2023, from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pertumbuhan-ekonomi/>.
- Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(1), 1–20.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2).
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, XXXVII, 1120–1149.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Pangiuk, A. (2017). Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi 2012-2015). 1 (Vol. 1 No. 1 (2017): *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.90>

- Pangkiro, H. A. K., Rotinsulu, D. C., Patrick, D., Jurusan, W., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). Pertumbuhan, Analisis Dan, Ekonomi Terhadap, Kemiskinan Ketimpangan, Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara (ANALYSIS OF GROWTH ECONOMIC AND POVERTY ON THE LEVEL OF INEQUALITY IN NORTH SULAWESI). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1)
- Pasaribu, M. (2022). UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Pateda, Y., A. J. Masinambouw, V., & Oldy Rotinsulu, T. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Gorontalo.
- Qian, Y., & Weingast, B. R. (1997). Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives. *Journal of Economic Perspectives*, 11(4), 83–92.
- Rachmawatie, D. (2021). Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 2085–1960.
- Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages. World Bank Policy Research Working Paper 2558
- Riadi, M. (2020, April 17). Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab dan Pengukuran). *Kajian Pustaka.Com*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpangan-pendapatan-pengertian-penyebab-dan-pengukuran.html>
- Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015). Addressing poverty and inequality in the rural economy from a global perspective. *Applied Geography*, 61, 11–23. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.005>
- Roy, J. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kalimantan timur. Universitas Hasanuddin
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Shavira Octavia, H. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa).
- Siregar, B. (2015). Akutansi Sektor Publik: akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. UPP-STIM YKPN.
- Smith, B. C. (1985). Decentralization: The Teritorial Dimensi of the State. George Allen Unwin Publisher.
- Sugiyarto, Handoyo Mulyo, J., Natalia Selekty, R., Sosial Ekonomi Pertanian, J., Pertanian, F., & Gadjah Mada, U. (2015). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(2). www.bps.go.id
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D) (6th ed.). Alfabeta.

- Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar (3rd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryono.(2015). Analisis Regresi untuk Penelitian(1sted.).deepublish. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (n.d.). Economic development.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Eds. H. Munandar & P.A.L, Ed.; 6th ed.). Erlangga.
- Trimo, Y. (2022, November 30). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html> Universitas Esa Unggul, T.D. (n.d.). ANALISIS REGRESI DAN KORELASI BERGANDA.
- Utomo, E.S. (2021). Menakar Otonomi Daerah Dengan Dana Transfer. <https://www.unja.ac.id/menakar-otonomi-daerah-dengan-dana-transfer/>
- Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 3(8), 458–477.
- Walinono, A.M.I. (2022). Analisis Desentralisasi Fiskal Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. 9.

BAB II
TOPIK PENELITIAN I
PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI BARAT

2.1. Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan penanaman modal memiliki peran penting dalam memengaruhi dinamika kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sampel jenuh, yaitu seluruh observasi runtut waktu yang berhasil dihimpun dan dapat dipadankan secara temporal selama periode 2017–2022. Karena variabel berasal dari beberapa sumber data sekunder, penelitian ini menekankan penggunaan observasi yang konsisten secara periodik dalam estimasi. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama bukan banyaknya unit sampel dalam pengertian *cross-section*, melainkan konsistensi horizon waktu dan keterbandingan antar seri data yang digunakan dalam model.

Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh langsung antara variabel eksogen dan endogen yang diamati. Pendapatan asli daerah, belanja daerah dan penanaman modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. PAD, belanja daerah, dan penanaman modal memiliki kecenderungan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, namun pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan sering kali tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan PAD cenderung masih terfokus pada belanja rutin dan belum diarahkan secara efektif untuk program pemberdayaan masyarakat miskin. Demikian pula, belanja daerah banyak terserap untuk kebutuhan administratif dibandingkan belanja sosial yang berdampak langsung. Sementara itu, penanaman modal yang masuk umumnya belum sepenuhnya menyasar sektor yang menyerap tenaga kerja miskin, sehingga belum memberi dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, meski secara teori variabel-variabel ini berpotensi menekan kemiskinan, namun dalam praktiknya pengaruh tersebut belum signifikan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Penanaman Modal dan Kemiskinan

2.2. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyentuh sisi sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pembangunan. Di Indonesia, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah digulirkan sejak lama, tingkat kemiskinan di berbagai wilayah masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Salah satu provinsi yang masih berhadapan dengan masalah kemiskinan adalah Sulawesi Barat. Provinsi yang baru dimekarkan pada awal tahun 2000-an ini menunjukkan dinamika pembangunan yang belum merata, di mana sebagian masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan pesisir.

Tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Barat tidak hanya menjadi cerminan rendahnya tingkat kesejahteraan, tetapi juga menjadi sinyal bahwa peran kebijakan fiskal dan investasi daerah belum berjalan secara optimal. Upaya pengurangan angka kemiskinan seharusnya tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah pusat, melainkan juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen strategis yang merepresentasikan kemandirian fiskal suatu daerah. PAD, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah, mencerminkan kapasitas dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonominya.

Di Sulawesi Barat, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal yang bisa menjadi sumber penerimaan. Keterbatasan ini tentu saja berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam merancang dan membiayai program-program pengentasan kemiskinan secara mandiri. Rendahnya PAD dapat mengindikasikan terbatasnya ruang fiskal daerah dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan pembangunan yang bersifat pro-poor, atau berpihak kepada masyarakat miskin.

Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan PAD dan pendapatan daerah lainnya adalah melalui belanja daerah, khususnya belanja modal. Belanja daerah merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Belanja daerah terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah belanja modal, yang digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, komposisi dan kualitas belanja modal yang baik sangat menentukan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Praktiknya sering kali terjadi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil masyarakat. Di banyak daerah, termasuk di Sulawesi Barat, belanja daerah masih cenderung berfokus pada pengeluaran rutin dibandingkan investasi pembangunan jangka panjang. Hal ini menyebabkan terhambatnya akselerasi pembangunan yang seharusnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan. Belanja modal yang belum optimal bukan hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga melemahkan daya saing daerah dalam menarik investasi dari luar.

Investasi atau penanaman modal menjadi aspek penting lainnya dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dan membuka peluang pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Penanaman modal, baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur, perizinan yang mudah, dan insentif yang menarik. Di Sulawesi Barat, potensi sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan secara optimal akibat berbagai hambatan struktural, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Keberadaan investasi yang masuk ke suatu daerah tidak selalu secara otomatis mengurangi angka kemiskinan, tergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang diciptakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana dampak nyata dari penanaman modal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Melalui kajian ini, peneliti berupaya menelusuri hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah (khususnya belanja modal), dan Penanaman Modal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan pendekatan empiris dan data-data yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran strategis kebijakan fiskal dan investasi daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Hasil kajian ini tidak hanya akan memperkaya khasanah literatur kebijakan publik dan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 2019). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk menyejahterakan dirinya (Suryawati, 2019).

Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2019). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2019). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

2.3.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2021).

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang (Yulianti, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan landasan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menggali potensi keuangan daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kewenangan fiskal yang lebih luas dan adil kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 membagi kewenangan pemungutan pajak menjadi dua level, yaitu pertama Pajak Provinsi, yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan kedua, Pajak Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Undang undang ini juga mengatur berbagai jenis pajak dan retribusi, termasuk batas maksimum tarif, mekanisme pemungutan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan ini, daerah diberikan ruang untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah, tetapi tetap dalam kerangka nasional yang seragam untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.

2.3.3. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah adalah suatu kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran meliputi semua pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang jadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Menurut Siregar (2015) yang dimaksud dengan belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut Khusaini (2018) yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

2.3.4. Penanaman Modal

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata investment, yang berasal dari bahasa Inggris. Investment diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "investasi" atau "penanaman modal". Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan

hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Sidik dan Sutrisno (2018) menjelaskan bahwa istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Dalam hal ini penanaman modal dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk kegiatan yaitu penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal digunakan untuk menghasilkan produk baru.

Ahmad (2020) mendefinisikan penanaman modal sebagai penempatan uang atau dana yang diharapkan dapat memberikan tambahan atau keuntungan atas uang/dana tersebut. Dengan kata lain penanaman modal yaitu tindakan membeli saham, obligasi, dan barang modal serta berbagai bidang lainnya seperti pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dll.

2.4. Metode Penelitian

2.4.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut (Danari Paramita et al., 2021) penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi). sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya (Ibrahim et al., 2018).

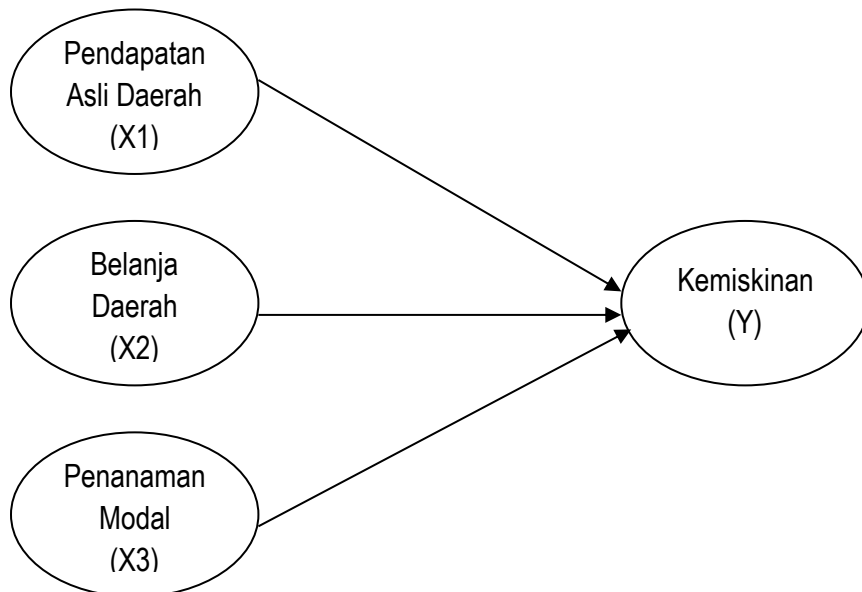
2.4.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi Sulawesi Barat, dimana yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Sulawesi Barat dari tahun 2017 – 2022. Data yang dianalisis bersumber dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupa data Penanaman Modal, serta dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah.

2.4.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh PAD, belanja daerah, dan penanaman modal terhadap kemiskinan. Sulawesi Barat sebagai wilayah dengan tantangan pembangunan yang kompleks memberikan studi kasus menarik untuk memahami hubungan dinamis antara variabel-variabel tersebut dalam konteks pembangunan daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris yang mendalam serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat peran PAD, belanja daerah, dan penanaman modal dalam menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pikir Bab II

2.4.4 Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2008) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. sampel jenuh dalam konteks penelitian ini yaitu seluruh observasi runtut waktu yang berhasil dihimpun dan dapat dipadankan secara temporal selama periode 2017–2022. Karena variabel berasal dari beberapa sumber data sekunder, penelitian ini menekankan penggunaan observasi yang konsisten secara periodik dalam estimasi. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama bukan banyaknya unit sampel dalam pengertian *cross-section*, melainkan konsistensi horizon waktu dan keterbandingan antarseri data yang digunakan dalam model.

Unit observasi dalam penelitian ini adalah seluruh observasi periodik yang tersedia dalam horizon waktu penelitian, yaitu periode 2017–2022. Oleh karena itu, penggunaan istilah sampel jenuh dalam penelitian ini dimaknai sebagai penggunaan seluruh observasi runtut waktu yang berhasil dihimpun dan dapat diolah secara konsisten. Untuk menghindari ambiguitas, frekuensi data dijelaskan mengikuti satuan periodik aktual yang digunakan dalam estimasi, sehingga tidak terjadi perbedaan antara penjelasan metode, jumlah observasi, dan keluaran statistik model

2.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mengingat seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai instansi atau dinas terkait, atau lembaga yang berkompeten tentang data statistik. Data-data yang dimaksud adalah berupa data publikasi, data laporan tercetak yang diterbitkan secara berkala dari berbagai instansi, dinas ataupun lembaga terkait yang berkompeten, dalam hal ini adalah laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pusat Statistik, maupun lembaga lainnya, yang diakses secara langsung maupun secara online melalui website dari lembaga-lembaga tersebut.

2.4.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan perluasan dari analisis regresi linier sederhana, dimana menggambarkan hubungan pengaruh antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen, artinya bahwa perubahan nilai Y tidak mutlak hanya dipengaruhi oleh satu nilai X tertentu tetapi dipengaruhi oleh banyak nilai X.

Bentuk umum model regresi linier berganda dengan variabel independen adalah

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana Y adalah variabel dependen, X_1 , X_2 , dan X_3 adalah variabel independen, ε adalah galat acak (random error), dan β_0 , β_1 , β_2 , β_3 adalah parameter populasi yang nilainya tidak diketahui. Variabel independen X_1 , X_2 , dan X_3 dianggap bukan variabel acak dan dapat diobservasi dengan kekeliruan yang dapat diabaikan (Suryono, 2015).

Namun demikian, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder agregat dan desain observasional non-eksperimental, maka hasil estimasi dipahami sebagai hubungan statistik dalam model, bukan klaim kausal yang absolut. Oleh sebab itu, interpretasi temuan dibatasi pada arah hubungan dan signifikansi koefisien yang diperoleh, sambil tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor lain di luar model yang ikut memengaruhi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan

2.4.7 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).

1. **Kemiskinan (Y).** Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud dalam kajian ini mengacu pada kemiskinan absolut sebagaimana didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu kondisi di mana pengeluaran per kapita masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Namun

demikian, kajian ini juga menempatkan kemiskinan sebagai fenomena struktural, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketidakseimbangan alokasi belanja, dan belum optimalnya penanaman modal yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. **Pendapatan Asli Daerah (X1).** Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu:
 - a. Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib masyarakat kepada daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum;
 - b. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal daerah pada BUMD atau bentuk usaha lainnya;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah, yaitu semua jenis penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, seperti pendapatan dari jasa giro, pendapatan dari penjualan atau sewa aset daerah, dan pendapatan bunga.
3. **Belanja Daerah (X2).** Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan selama periode penelitian. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kelompok utama, yaitu:
 - a. Belanja operasional merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
 - b. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun, seperti infrastruktur, peralatan, dan bangunan.
 - c. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang disediakan untuk keperluan mendesak atau tidak terduga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam dan keadaan darurat.
 - d. Belanja transfer merupakan belanja yang diberikan kepada pemerintah desa atau antar pemerintah daerah lainnya dalam bentuk transfer dana, baik yang bersifat umum maupun khusus.
4. **Penanaman Modal (X3).** Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanaman modal terdiri atas dua jenis utama:

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman modal yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau pemerintah daerah, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri.
- b. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia

Tabel 2. 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Teori
1	Kemiskinan	Kemiskinan Absolut Kemiskinan Struktural	BPS, Metodologi Pengukuran Kemiskinan, 2021
2	PAD	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang sah	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3	Belanja Daerah	Belanja Operasional Belanja Modal Belanja Tak terduga Belanja Transfer	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Penanaman Modal	Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing	UU No 25 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal

Untuk menjaga konsistensi konseptual, istilah pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini merujuk pada perubahan kinerja ekonomi daerah dari waktu ke waktu. Apabila indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, maka variabel tersebut dipahami sebagai proksi kapasitas ekonomi rata-rata penduduk daerah, bukan semata-mata laju pertumbuhan output. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian dilakukan secara hati-hati: peningkatan indikator ini menunjukkan perbaikan kapasitas ekonomi per kapita, tetapi belum otomatis mencerminkan pertumbuhan yang inklusif atau merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

2.4.8 Hipotesis Penelitian

Penelitian Siregar (2015) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan melalui PAD. Semakin besar PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah

daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. PAD digunakan untuk belanja yang bersifat produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

Wahyuni dkk (2014) menekankan peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah, khususnya belanja modal, menciptakan permintaan agregat yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Pateda et al (2019) penanaman modal berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, inovasi, dan akumulasi modal fisik serta manusia. Investasi, baik domestik maupun asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan.

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bersesuaian dengan teori kemandirian dikemukakan oleh Rahman (2021) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Semakin tinggi PAD, semakin besar peluang pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu antara lain Rahman dan Prasetyo (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan, terutama pada daerah yang mampu mengelola PAD secara efektif dan mengarahkannya pada program-program pemberdayaan ekonomi. Wulandari (2020) menganalisis data panel provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan; semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin rendah angka kemiskinannya, dengan catatan efisiensi anggaran tetap dijaga. Hidayat dan Maulana (2019) melalui studi kuantitatif di wilayah Jawa Timur menemukan bahwa peran PAD terhadap kemiskinan lebih dominan di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan, mengingat konsentrasi aktivitas ekonomi lebih tinggi di kota. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemiskinan.
2. Pengaruh belanja daerah secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Ini bersesuaian dengan teori alokasi anggaran dari Arifin (2023) bahwa alokasi anggaran untuk belanja daerah, khususnya belanja modal, memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja. Dikaitkan dengan penelitian terdahulu yaitu Astuti dan Sari (2020) menunjukkan bahwa belanja modal daerah memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap angka kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Putra & Lestari (2021) meneliti kabupaten/kota di Sumatera dan menyimpulkan bahwa pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan menjadi lebih kuat jika disertai efisiensi birokrasi dan pengawasan anggaran. Fauziah (2022) menunjukkan bahwa jenis

belanja yang paling efektif menekan kemiskinan adalah belanja infrastruktur dasar (jalan, irigasi, dan sanitasi), di mana masyarakat miskin sangat diuntungkan dari perbaikan akses

Hal ini menegaskan bahwa alokasi anggaran yang difokuskan pada sektor-sektor produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Namun, efektivitasnya bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran. Ketika belanja daerah digunakan secara efisien dan diarahkan pada kegiatan yang memberi dampak ekonomi langsung, maka peran fiskal daerah sebagai alat redistribusi pendapatan akan lebih optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah diduga Belanja Daerah berpengaruh terhadap kemiskinan.

3. Pengaruh penanaman modal secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Teori Investasi dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa investasi sektor riil yang masuk ke daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, terutama jika diarahkan pada sektor padat karya dan berskala lokal.

Relevansi dengan penelitian terdahulu antara lain Kurniawan & Syafitri (2022) meneliti dampak PMDN dan PMA di 34 provinsi Indonesia dan menemukan bahwa penanaman modal yang diarahkan ke sektor padat karya secara signifikan menurunkan angka kemiskinan, terutama di luar Jawa. Yuliani & Rachman (2020) menemukan bahwa PMA memiliki dampak yang lebih lambat terhadap pengurangan kemiskinan dibanding PMDN, karena keterbatasan akses tenaga kerja lokal ke sektor-sektor yang dikuasai asing. Arifin (2023) melalui pendekatan spasial menemukan bahwa efek penanaman modal terhadap kemiskinan bersifat regional-spillover, artinya investasi di satu daerah dapat turut menurunkan kemiskinan di daerah tetangga melalui konektivitas ekonomi.

Investasi yang inklusif tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah diduga Penanaman Modal berpengaruh terhadap kemiskinan.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan penanaman modal secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Magdalena dkk (2022) Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah, semakin kecil tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2024) menemukan bahwa PAD yang semakin tinggi akan memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja daerah. Apabila dalam penggunaan dana PAD untuk belanja daerah dilakukan secara efisien dan efektif maka secara perlahan tingkat kemiskinan daerah akan menurun. Untuk Penanaman Modal menurut Thalita dan Ruth (2024) memberikan pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan uraian tersebut,

maka hipotesis penelitian adalah diduga Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Penanaman Modal berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.

2.4.9 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih perlu diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.

1. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 ini mempunyai range 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin besar nilai R^2 maka semakin baik hasil regresi tersebut dan semakin besar mendekati 0 (nol) maka variabel secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat

2. Uji Parsial (Uji t)

Menguji koefisien regresi masing-masing variabel independen secara parsial dengan menggunakan uji test, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Hipotesis:

H_0 : variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Menentukan level of signifikan pada $\alpha = 0,05$

c. Menentukan t-hitung

d. Dasar pengambilan keputusan

H_0 : diterima bila t-hitung < t-tabel

H_1 : diterima bila t-hitung > t-tabel

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

a. Hipotesis pengujiannya adalah:

H_0 : semua variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Menentukan level of signifikan pada $\alpha = 0,05$

c. Menentukan F-hitung

d. Dasar pengambilan keputusan

H_0 : diterima bila F-hitung < F-tabel

H_1 : diterima bila F-hitung > F-tabel

2.5. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan topik penelitian I, PAD, belanja daerah dan penanaman modal berdampak terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Untuk topik penelitian I hasil uji hipotesis dilihat dari koefisien determinasi (R^2) pada model ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel eksogen atau independen dalam menjelaskan variasi dari variabel endogen atau dependen. Saat nilai R^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan semakin baik.

Tabel 2. 2. Hasil Koefisien Determinasi Sub Struktur 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.305 ^a	.093	.053	.53654

a. Predictors: (Constant), Pennm Modal (X3), Belanja Daerah (X2), PAD (X1)

Sumber: Data setelah diolah, 2025

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa hasil model analisis jalur sub struktur 1 memiliki nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.305 (30.5%) dan nilai adjusted R square sebesar 0.093 (9.3%). Terlihat nilai adjusted R square menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dapat menjelaskan pengaruh variabel PAD, belanja daerah dan penanaman modal secara bersama-sama sebesar 0.093 atau 9.3% dan sisanya 90.7% (100% - 9.3%) kemungkinan dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar dari model ini.

Kajian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap variabel kemiskinan secara parsial, peneliti menggunakan uji t dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung > t tabel atau - t hitung > t tabel dan nilai signifikan > 0.05 maka H_a diterima.
2. Jika nilai t hitung < t tabel - t hitung > t tabel dan nilai signifikan < 0.05 maka H_o diterima.

Pengujian untuk uji t sub struktur 1 dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Hasil Uji t Sub Struktur 1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.526	3.333		.758	.451
PAD (X1)	.261	.135	.248	1.930	.058
Belanja Daerah (X2)	.036	.096	.048	.377	.707
Penanam Modal (X3)	.081	.086	.109	.937	.352

a. Dependent Variable: Kemiskinan (Y3)

Sumber: Data setelah diolah, 2025

Terlihat pada tabel 2.3 di atas diperoleh informasi nilai t hitung variabel PAD (X1), belanja daerah (X2) dan penanaman modal (X3) terhadap kemiskinan (Y3). Dengan nilai t tabel dengan level signifikan 0.05, diperoleh t tabel 1.993. Diketahui bahwa nilai t hitung variabel PAD (X1) yaitu 1.930 dengan probabilitas 0.058 > 0.05, variabel belanja daerah (X2) yaitu 0.377 dengan probabilitas 0.707 > 0.05 dan variabel penanaman modal (X3) yaitu 0.937 dengan probabilitas 0.352 > 0.05. Secara keseluruhan menunjukkan pengaruh parsial dari variabel bebas PAD (X1), belanja daerah (X2) dan penanaman modal (X3) positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y3), karena nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel 1.993 dan probabilitas lebih besar dari 0.05.

Berdasarkan uraian di atas, berikut hasil rangkuman keseluruhan analisis koefisien jalur sub struktur 1:

Tabel 2. 4. Rangkuman Analisis Koefisien Jalur Sub Struktur 1

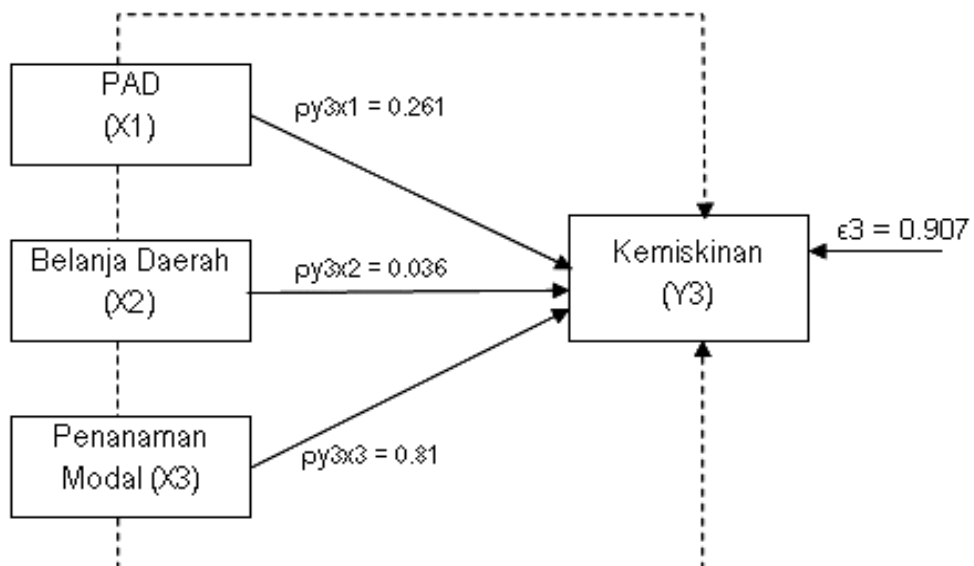
No	Hipotesis	Koefisien Jalur	t hitung	t tabel	Hasil
1	$\gamma_{31} = 0$	0.261	1.930	1.993	Ha ditolak
2	$\gamma_{32} = 0$	0.036	0.377	1.993	Ha ditolak
3	$\gamma_{33} = 0$	0.081	0.937	1.993	Ha ditolak

Sumber: Data setelah diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel di atas uji parsial PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan, serta besarnya angka residu di dapat dari 1 – adjusted R square yaitu 1 – 9.3 = 0.907. Maka dari itu persamaan regresi sub struktur 1 sebagai berikut:

$$Y_3 = \rho_{Y_3X_1} + \rho_{Y_3X_2} + \rho_{Y_3X_3} + \epsilon_3$$

$$Y_3 = 0.261 X_1 + 0.036 X_2 + 0.081 X_3 + 0.907$$



Gambar 2. 2. Hasil Pengaruh Kausal Sub Struktur 1

Keterangan:

- $\rho_{Y_3X_1}$ = Koefisien pengaruh antara PAD (X1) dengan kemiskinan (Y3)
- $\rho_{Y_3X_2}$ = Koefisien pengaruh antara belanja daerah (X2) dan kemiskinan (Y3)
- $\rho_{Y_3X_3}$ = Koefisien pengaruh antara penanaman modal (X3) dan kemiskinan (Y3)
- ϵ_3 = Koefisien residual atau error residual

Berdasarkan hasil analisis sub struktur 1, PAD, belanja daerah, dan penanaman modal menunjukkan koefisien positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketiga variabel tersebut dalam periode pengamatan belum cukup kuat diterjemahkan menjadi penurunan kemiskinan. Dalam konteks Sulawesi Barat, hasil tersebut dapat dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas fiskal, dominasi belanja rutin, dan struktur investasi yang belum sepenuhnya terhubung dengan penciptaan kesempatan ekonomi bagi kelompok miskin.

Hal ini tampak dari kemiskinan struktural di daerah tersebut dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian masyarakat yang rendah membatasi mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari investasi. PAD Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari sektor pajak dan retribusi, yang cenderung membebani masyarakat. Hal ini tidak langsung menciptakan aktivitas ekonomi baru atau mengentaskan kemiskinan. Daerah ini masih sangat bergantung pada sektor primer (pertanian dan perkebunan), dengan kontribusi PAD dari sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) yang minim. Hal ini membatasi peluang peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Selain itu, sebagian besar belanja daerah diarahkan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan, dengan alokasi yang kecil untuk belanja modal atau program pengentasan kemiskinan. Belanja daerah yang dialokasikan untuk infrastruktur besar, seperti jalan atau gedung pemerintahan, tidak selalu menjangkau masyarakat miskin yang berada di daerah terpencil. Pengelolaan anggaran sering kali tidak optimal, baik karena keterbatasan kapasitas pemerintah daerah maupun karena praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan dana.

Selanjutnya untuk penanaman modal, sebagian besar investasi di Sulawesi Barat berorientasi pada sektor perkebunan kelapa sawit atau tambang, yang melibatkan teknologi tinggi dan sedikit tenaga kerja lokal. Akibatnya, dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin menjadi kecil. Manfaat dari investasi sering kali dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti pemilik modal atau pengusaha besar, sementara masyarakat miskin tetap tidak mendapatkan akses langsung terhadap hasil investasi tersebut.

Sulawesi Barat masih memiliki infrastruktur dasar yang kurang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses ke pasar. Hal ini mengurangi daya tarik investasi sekaligus membatasi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari belanja daerah atau investasi. Sulawesi Barat memiliki daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga program pembangunan atau manfaat dari investasi sering kali tidak sampai ke wilayah ini. Sebagian besar keuangan daerah masih bergantung pada DAU dan DAK, yang sering kali diarahkan untuk kebutuhan administratif daripada pengentasan kemiskinan.

Korelasi yang tidak signifikan antara PAD, belanja daerah, dan penanaman modal terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dan inklusif dalam pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan. Dengan diversifikasi ekonomi, reorientasi belanja, dan investasi yang lebih inklusif, dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan di Sulawesi Barat dapat ditingkatkan secara signifikan.

Berikut perhitungan uji F, jika nilai f hitung $> f$ tabel atau nilai signifikan > 0.05 maka H_a diterima dan begitupun sebaliknya jika nilai f hitung $< f$ tabel atau nilai signifikan < 0.05 maka H_o diterima.

Tabel 2. 5. Hasil Uji F Sub Struktur 1

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.014	3	.671	2.332	.082 ^a
Residual	19.575	68	.288		
Total	21.589	71			

a. Predictors: (Constant), Penm Modal (X3), Belanja Daerah (X2), PAD (X1)

b. Dependent Variable: Kemiskinan (Y3)

Sumber: Data setelah diolah, 2025

Berdasarkan hasil SPSS pada tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F hitung yaitu 2.332 dengan probabilitas 0.082. Sedangkan F tabel dengan level signifikan 0.05, degree of freedom (df) untuk $df_1 = 3$, $df_2 = (72-3-1) = 68$ maka F tabel sebesar 2.740. Dimana nilai F hitung 2.332 lebih kecil dibandingkan dengan nilai F tabel 2.740. Karena nilai F hitung ($2,332 < F \text{ tabel } (2,740)$ dan nilai signifikansi ($0,082 > 0,05$), maka secara statistik hasil ini tidak signifikan pada level kepercayaan 95%. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Artinya, model regresi yang dibentuk secara keseluruhan belum cukup kuat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel yang diamati. Ini juga tercermin dari nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,082 yang masih di atas ambang batas 0,05, sehingga secara statistik tidak cukup kuat untuk menolak hipotesis nol.

Tabel 2. 6. Perbandingan Hipotesis dan Teori

No	Hipotesis	Teori
1	Pendapatan asli daerah, berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat	Teori kemandirian dikemukakan oleh Rahman (2021) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
2	Belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat	Teori alokasi anggaran dari Arifin (2023) bahwa alokasi anggaran untuk belanja daerah, khususnya belanja modal, memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja

No	Hipotesis	Teori
3	Penanaman modal berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat	Teori Investasi dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa investasi sektor riil yang masuk ke daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, terutama jika diarahkan pada sektor padat karya dan berskala lokal
4	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Penanaman Modal berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan	Magdalena dkk (2022) Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah, semakin kecil tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2024) menemukan bahwa PAD yang semakin tinggi akan memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja daerah. Apabila dalam penggunaan dana PAD untuk belanja daerah dilakukan secara efisien dan efektif maka secara perlahan tingkat kemiskinan daerah akan menurun. Untuk Penanaman Modal menurut Thalita dan Ruth (2024) memberikan pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan.

2.6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk PAD, belanja daerah dan penanaman modal terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat, hasil analisis sub struktur 1 menunjukkan PAD, belanja daerah dan penanaman modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan PAD Sulawesi Barat cenderung rendah dan berasal dari sumber-sumber tradisional, seperti pajak daerah dan retribusi, yang tidak cukup produktif untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru. Akibatnya, kontribusi PAD terhadap pengurangan kemiskinan tidak signifikan karena manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

Dilihat dari belanja daerah, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan rutin (operasional dan gaji pegawai), sementara belanja untuk infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan relatif kecil. Efisiensi penggunaan belanja daerah masih rendah, sehingga tidak mampu memberikan dampak signifikan pada pengurangan kemiskinan. Kemudian penanaman modal yang kurang memberdayakan. Terlihat dari investasi yang masuk ke Sulawesi Barat lebih berorientasi pada sektor perkebunan dan tambang, yang bersifat kapital intensif dan kurang menyerap tenaga kerja lokal. Ketimpangan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai membatasi distribusi manfaat investasi ke wilayah pedesaan, tempat kemiskinan sering kali lebih tinggi.

Untuk meningkatkan dampak PAD, belanja daerah, dan penanaman modal terhadap pengurangan kemiskinan di Sulawesi Barat, rekomendasi melakukan diversifikasi dan pengembangan sumber PAD dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti

pariwisata, industri kreatif, dan usaha kecil menengah (UKM) untuk meningkatkan PAD yang produktif, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi nyata pada perekonomian lokal, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas masyarakat miskin, memastikan belanja daerah diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan program kesehatan serta pendidikan gratis untuk masyarakat miskin, serta mengembangkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung investasi berbasis ekonomi lokal, seperti agroindustri dan produk unggulan daerah. Dengan mengimplementasikan hal tersebut, diharapkan PAD, belanja daerah, dan penanaman modal dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Sulawesi Barat, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.7. Daftar Pustaka

- Abimanyu, A. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2005/07/04/102020-format-anggaran-terpadu-menghilangkan-tumpang-tindih>.
- Abu-Bader, S., & Jones, T.V. (2021). Statistical mediation analysis using the sobel test And hayes spss process macro. In *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods* (Vol. 9, Issue 1).
- Adi, P.H. (n.d.). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah*. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Amagoh, F., & Ajab Amin, A. (2012). An Examination of the Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*, 3(6). <https://doi.org/10.5430/ijba.v3n6p72>.
- Andhiani, K.D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 2303–1255.
- Anisa Sopiah. (2023, January 17). *Garis Kemiskinan 2022 Tertinggi dalam 9 Tahun Terakhir*. CNBC Indonesia. Annim, S.K., S.M. and J. Sebu. (2012). *Spatial Inequality and Household Poverty in Ghana*. Economic Systems
- Arifin, A. (2023). *Analisis kemiskinan regional dan strategi pengentasan berbasis pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arini, & Mustika, M. D. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal EPUnd*, 4(3), 1140–1163.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi ke-5). UPP STIMYKPN.
- Aryaputra, A., Pratiwi, F., & Rasyid Aryasatya, I. (2022). Transfer Pemerintah Pusat Sebagai Wujud Desentralisasi Fiskal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Bentuk Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendapatan, Efektif atau Tidak? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 111–118.
- Astuti, L., & Sari, F. R. (2020). Analisis Belanja Modal terhadap Penurunan Kemiskinan di Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 89–97.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat. (2023). *Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat*.
- Balqis, R., & Suriani. (2020). *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh*.

- Bird, R.M. (Richard M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.
- Bourguignon, F. (n.d.). *The Poverty Growth Inequality Triangle*. <https://www.researchgate.net/publication/5127146> BPKAD Kab. Kuningan. (2022, October 21). *Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebih Dekat (Bagian 1)*. <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenai-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1>
- Daniar Paramita, R.W., Rizal, N., & Sulistyan, R. (2021). *Metode penelitian kuantitatif* (R.W. Daniar Paramita, N. Rizal, & R. Sulistyan, Eds.; 3rd ed.). Widayagama Press.
- Darwin Damanik, dan, Studi Ekonomi Pembangunan, P., Ekonomi, F., Simalungun JI Sisingam angaraja Barat, U., Kapul, B., Sitalasari, S., Pematang Siantar, K., Utara -, S., & Penulis, K. (2021). ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PEMATANG SIANTAR. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kotadan Kabupaten di Sumatera Barat). *Pekbis Jurnal*, 8(1), 1–13.
- Dinarjito, A., Keuangan, P., Stan, N., Dharmazi, A., Pendidikan, B., & Keuangan, P. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1, 57–72.
- Dulyadi. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS* (J.T. Santoso, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM.
- Fauziah, N. (2022). *Penanaman modal dalam negeri dan dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gumelar, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Untirta.Ac.Id*, 11.
- Hadi, S., & Saragih, T.M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, XVIII(3). <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010>,
- Hamidi, U.S., Puspita, D., Penulis Badan, T., Fiskal, K., Keuangan, K., Pahlevi, M., Raharja, M., Hadi, S., Latief Baroto, A., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2022). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Editor*.
- Hidayat, R., & Maulana, T. (2019). *Ketimpangan fiskal dan dinamika kemiskinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ibrahim, A., Haq Alang, A., Baharuddin, Ahmad, M.A., & Darmawati. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN* (I. Ismail, Ed.; 1st ed.). Gunadarma Ilmu.
- Jonaidi, A. (2012a). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1.
- Jonaidi, A. (2012b). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1. <https://media.neliti.com/media/publications/7098-ID-analisis-pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf>

- Kadir,A.(2009).Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia.<http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/08/Pajak-Daerah-dan-Retribusi-Daerah-dalam-Perspektif-Otonomi-di-Indonesia.pdf>
- KhamilahSiregar,O.,&Ramadhan,P.A.(2020).Pengaruhbelanjadaerah,Pendapatanasli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Disumaterautara.JurnalAkuntansiDanPublik,11(2).
- Kharisma,B.(2013).DesentralisasiFiskalDanPertumbuhanEkonomiSebelumDanSesudah EraDesentralisasi Fiskal Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 14(2), 101–119.
- Kharisma, B., & Hanifah, H. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 23(2), 179. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.666>
- KPPOD.(2021).PDRDdalamRUUHKPD_PolicyNote-.
- Kuncoro,M.(2006).Ekonomipembangunan:teori,masalah,dankebijakan(Ed.IV).Yogyakarta:UPPSTIM YKPN.
- Kurniawan, D., & Syafitri, A. (2022). Dampak Penanaman Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Data Panel Provinsi. Jurnal Ekonomi Regional, 14(3), 110–122
- Mardiasmo.(2009). Akutansi Sektor Publik. Andi.
- Marques,J.(n.d.).PengaruhInvestasi,JumlahTenagaKerjadanPengeluaranPemerintah TerhadapPertumbuhan Ekonomi di Timor Leste Periode 2004-2011. Retrieved April 4, 2023, from <http://repository.upnyk.ac.id/4308/1/INTISARI.pdf>
- Masdi,A.(2021).MelacakKebijakanPenangananFakirMiskin.KementrianKeuangan. Miftakhuiddin. (2019). Kolonialisme Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni.
- Muthia, A. (2019). Analisis Pro-poor Growth Melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2015. Indonesian Journal of Applied Statistics, 2(2).
- Nadhor,R.A.(2019).PengaruhDanaPerimbanganDanPendapatanAsliDaerah(PAD) TerhadapBelanjaDaerah Pemerintah(Studi Kasus Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2017-2018).
- Nanga,M.(2005). Makro ekonomi: teori masalah & kebijakan (2nded.).RajaGrafindo Persada.
- NurAzizah,L.(n.d.).Apa Itu TeoriPertumbuhanEkonomi-Gramedia Literasi. Retrieved January 28, 2023, from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pertumbuhan-ekonomi/>.
- Nurman,M.A.(2013).PengaruhDesentralisasiFiskalTerhadapDisparitasPendapatanRegionalDiIndonesia Tahun 2001-2008. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(1), 1–20.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46(2). Oates,W.E.(1999).AnEssayonFiscalFederalism. JournalOfEconomicLiterature,XXXVII,1120–1149.

- Pangiuk, A. (2017). Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi 2012-2015). 1 (Vol. 1 No. 1 (2017): *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.90>
- Pangkiro, H. A. K., Rotinsulu, D. C., Patrick, D., Jurusan, W., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). Pertumbuhan, Analisis Dan, Ekonomi Terhadap, Kemiskinan Ketimpangan, Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara (ANALYSIS OF GROWTH ECONOMIC AND POVERTY ON THE LEVEL OF INEQUALITY IN NORTH SULAWESI). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1)
- Pasaribu, M. (2022). UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Pateda, Y., A. J. Masinambouw, V., & Oldy Rotinsulu, T. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Gorontalo.
- Putra, D. A., & Lestari, S. M. (2021). *PAD, kemiskinan, dan investasi daerah: Hubungan kausalitas dan kebijakan fiskal*. Semarang: Unnes Press.
- Qian, Y., & Weingast, B. R. (1997). Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives. *Journal of Economic Perspectives*, 11(4), 83–92.
- Rachmawatie, D. (2021). Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 2085–1960.
- Rahman, M. A., & Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 45–53.
- Riadi, M. (2020, April 17). Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab dan Pengukuran). *Kajian Pustaka.Com*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpangan-pendapatan-pengertian-penyebab-dan-pengukuran.html>.
- Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015). Addressing poverty and inequality in the rural economy from a global perspective. *Applied Geography*, 61, 11–23. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.005>
- Roy, J. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kalimantan Timur. Universitas Hasanuddin
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Shavira Octavia, H. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa).

- Siregar,B.(2015).AkutansiSektorPublik:akuntansikeuanganpemerintahdaerahberbasisak
rual .UPP-STIM YKPN.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Teritorial Dimension of the State*. George Allen
Unwin Publishers.
- Sugiyarto, Handoyo Mulyo, J., Natalia Selekty,R., Sosial Ekonomi Pertanian, J.,Pertanian,
F., & Gadjah Mada, U. (2015). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah
Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *JurnalAgro Ekonomi*, 26(2). www.bps.go.id.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (pendekatan
kuantitatif,kualitatifdanR&D) (6thed.).Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). PT. Raja Gralindo Persada.
- Suryono.(2015).Analisis Regresi untuk Penelitian(1sted.).deepublish. Todaro, M. P., &
Smith, S. C. (n.d.). *Economic development*.
- Todaro,M.P.,&Smith,S.C.(2006). Pembangunan Ekonomi (Eds.H.Munandar
&P.A.L,Ed.;6thed.). Erlangga.
- Trimio, Y. (2022, November 30). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan
di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara.
[https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-
terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-
indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html) Universitas Esa
Unggul,T.D.(n.d.).ANALISISREGRESIDANKORELASIBERGANDA.
- Utomo,E.S.(2021). Menakar Otonomi Daerah Dengan Dana
Transfer.<https://www.unja.ac.id/menakar-otonomi-daerah-dengan-dana-transfer/>
- Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran
Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan
Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*
Universitas Udayana, 3(8), 458–477.
- Walinono,A.M.I.(2022). Analisis Desentralisasi Fiskal Ketimpangan Pendapatan dan
Tingkat Kemiskinan di Indonesia. 9.
- Wulandari, L. (2020). *Strategi peningkatan PAD dan implikasinya terhadap pelayanan
publik dan kesejahteraan sosial*. Jakarta: Kencana.
- Yuliani, N., & Rachman, A. (2020). *Pengaruh penanaman modal asing dan dalam negeri
terhadap pengurangan angka kemiskinan*. Bandung: Refika Aditama.